

ipemi

Kolaborasi JNI-KIM-BAINHAMRI Siap Laporkan dan Diminta APH-KPK Telusuri Aroma Korupsi Sejumlah Pokir Anggota Dewan Baru

Updates - [SULSEL.IPEMI.OR.ID](https://sulsel.ipemi.or.id)

May 16, 2024 - 06:50



BARRU- Ketua DPD JNI Barru, Anggota KIM dan juga BAIN HAM RI minta Kejaksaan, Tipikor, KPK telusuri adanya aroma korupsi pada pokir anggota DPRD Kabupaten Barru dalam bentuk proyek jalan tani.

Pada pelaksanaan pekerjaan yang di sampel sejumlah anggota DPRD Barru oleh tim investigasi DPD JNI Barru, KIM, BAIN HAM RI di sejumlah kegiatan anggota DPRD Barru bekerjasama dengan pengusaha atau satuan kelompok usaha masyarakat atau kontaktor yang melakukan pekerjaan proyek pokir aspirasi anggota DPRD pada proyek jalan tani sarat tercium aroma korupsi sekitar 20-30%ri anggaran.

20-30% itu tercium adalah suatu dugaan kuat keuntungan murni yang diterima oleh sang Dewan pada praktek jual beli proyek pokir miliknya.



"kami tidak menyebutkan nama disini untuk sementara ini, akan tetapi data kami sudah kantongki sesuai hasil investigasi mengarah kepada praktek jual beli proyek melalui anggota DPRD Barru yang kita sudah kantongki nama - namanya dan siap kita laporkan dalam bentuk surat dan dokumen data hasil investigasi," Urai Ketua DPD JNI Barru Hasyim, SE, S.Pd, C.L.E pada Kamis (16/05/2023)

Lalu Kemudian ada beberapa fakta hasil investigasi dibeberapa lokasi, pada hasil pekerjaan jalan tani yang mereka kerjakan diduga tidak sesuai spesifikasi hingga berefek pada kualitas buruk.

Selain Pokir DPRD Barru tercium aroma korupsi, ada hasil investigasi yang mengarah pada korupsi milyaran yang juga terkait salah seorang anggota DPRD Barru yang sementara kami dalami untuk sekalian kita laporkan ke APH nanti.



"Itu dugaan sementara, hal itu diduga mereka menikmatinya hampir 5 tahun lamanya," ucap Hasyim.

Diakhir penyampaiannya Hasyim, berharap NGO dan jurnalis Barru harus lawan para koruptor yang ada di Barru dan bersama - sama kumpulkan hasil investigasi untuk kita laporkan bersama.

"Kami selalu siap laporkan ketika ada pejabat terindikasi korupsi," tegas Hasyim.

(Tim investigasi JNI)